



07 Jakabaring Palembang, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 25 November 2000 dibuat dihadapan Doktor Justin Aritonang, S.H. Notaris di Palembang dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25468.HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dihadapan Nyonya Elmadiantini, S.H., Sp.N, Notaris di Palembang dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0077306 tanggal 17 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.









**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit/ pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Untuk Bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sumsel Babel Cabang Manggar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah penyediaan tanah yang akan digunakan sebagai Bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mempermudah layanan perbankan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Penyediaan dan sewa tanah dengan luas tanah 12M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi panjang yang terletak di Jl. Raya Manggar-Gantung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 29.07.01.02.4.00028 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**PASAL 3**  
**OBJEK KERJA SAMA**

Lahan dalam pekarangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan luas tanah 12M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi panjang yang terletak di Jl. Raya Manggar-Gantung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 29.07.01.02.4.00028 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**PASAL 4**  
**HARGA SEWA**

Harga sewa tanah sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tidak termasuk pajak.

**PASAL 5**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini dibayar oleh **PIHAK KEDUA** secara sekaligus pada saat ditandatanganinya Perjanjian sebesar Rp.1.800.000,00,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) tahun tidak termasuk pajak, untuk itu dibuat Berita Acara Pembayaran atas penerimaan sejumlah uang sewa tersebut.
- (2) Uang sewa disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah dengan tujuan Bank Sumsel Babel Cabang Manggar dengan nomor rekening 163.300.00001.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
    1. Menyewakan tanah dengan luas tanah 12M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Raya Manggar-Gantung Kec. Manggar Kab. Belitung Timur kepada **PIHAK KEDUA**; dan
    2. Menyerahkan tanah kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik **PIHAK KESATU**.
  - b. **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima pembayaran atas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) diatas, yang dipergunakan sebagai Rumah ATM EMVW 430.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
    1. Membayar biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) Perjanjian ini;

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

2. Memelihara tanah yang disewakan **PIHAK KESATU** dengan baik dan penuh tanggung jawab;
  3. Tidak menggunakan tanah, baik sebagian maupun seluruhnya untuk melakukan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
  4. Tidak menyewakan lagi atau menyerahkan/mengoperkan/mengalihkan tanah baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
  5. Segala kerusakan kecil maupun besar dari tanah tersebut yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
  6. Menyerahkan kembali tanah pada saat berakhirnya perjanjian ini dalam keadaan baik dan terpelihara kepada **PIHAK KESATU**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
1. Menempati tanah yang disewakan yang dipergunakan sebagai Rumah ATM EMVW 430 Bank Sumsel Babel Cabang Manggar; dan
  2. Mengubah fasilitas yang tersedia pada tanah yang disewakan tersebut.

#### **PASAL 7 SANKSI**







- (1) Apabila karena sesuatu dan lain hal, **PIHAK KESATU** membatalkan dan/atau tidak dapat meneruskan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati bersama, maka **PIHAK KESATU** berkewajiban mengembalikan biaya kompensasi atas pemakaian Objek Sewa yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** secara proporsional sesuai dengan lamanya masa pemakaian yang telah dijalani, dan apabila **PIHAK KEDUA** membatalkan dengan/atau tidak meneruskan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya masa sewa tanah, maka **PIHAK KESATU** tidak berkewajiban untuk mengembalikan biaya kompensasi yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pengembalian biaya kompensasi pemakaian Objek Sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah adanya pernyataan dari salah satu **PIHAK** bahwa Perjanjian ini tidak dapat diteruskan/dibatalkan.

#### **PASAL 8 JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

#### **PASAL 9 PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan **PARA PIHAK** dari kewajiban dan tanggungjawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

**PASAL 10  
JAMINAN**

**PIHAK KESATU** menjamin bahwa apabila selama masa sewa terjadi tuntutan dari Pihak Ketiga atau adanya persoalan-persoalan yang menyebabkan objek sewa tersebut harus dikosongkan atau dieksekusi sehingga berakibat **PIHAK KEDUA** tidak dapat menggunakan objek sewa, maka **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar kompensasi/ganti rugi atas sisa jangka waktu sewa yang tidak digunakan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 11  
FORCE MAJEURE**





- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari **PARA PIHAK** atau disebut Force Majeure, tidak terbatas pada antara lain: tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/ huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemic, serangan virus computer dan sejenisnya, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (3) **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 10 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK** yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah **PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan melalui saluran hukum dan untuk hal tersebut masing-masing **PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

**PASAL 10  
ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam

Paraf	Pihak I:		
	Pihak II:		

Addendum yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama seperti perjanjian pokok.

**PASAL 11  
KETENTUAN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PIHAK** yang berwenang dan dibuat berdasarkan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/ mutasi dari **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini, maupun Perubahan Pemimpin/ Pengurus dan hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIMPINAN PT BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN  
BANGKA BELITUNG CABANG MANGGAR,**



**AL YOPPIE KUSUMA**

**PIHAK KESATU**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**IKHWAN FAHROZI**

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

Addendum yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama seperti perjanjian pokok.

**PASAL 11  
KETENTUAN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PIHAK** yang berwenang dan dibuat berdasarkan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/ mutasi dari **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini, maupun Perubahan Pemimpin/ Pengurus dan hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIMPINAN PT BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN  
BANGKA BELITUNG CABANG MANGGAR,**



**AL YOPPIE KUSUMA**

**PIHAK KESATU**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**IKHWAN FAHROZI**

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			